

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Addin, Asnur, dkk, 2011, *Dari Kerajaan Ke Provinsi Sultra*, Penerbit Yayasan Fajar Al Buthuni, Baubau.
- _____, 2011, *Wilayah Kesultanan Buthuni*, Penerbit Yayasan Fajar Al Buthuni, Baubau.
- Friedman, Lawrence, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System a Social Science Prespective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Cetakan ke-V, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Haar, Ter, 1960, “*Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Setelsel van het Adatrecht)*”, Poeponoto, K. Ng. Soebakti, Cetakan Ke-Sepuluh, PT. Percetakan dan Penerbitan Abadi.
- Muhammad, Bushar, 1961, *Pengantar Hukum Adat (jilid I)*, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- Mudjiruddin, M. Mudjur Muif Ahmad, 2009, *Mengungkap Tabir Sejarah Spiritual dan Metafisika, Theokrasi serta Monarkhi Parlementer Keshultanan Buton (Bidaaril Buthuuni)*, Jabbal Qubais, Bogor.
- Rato, Dominikus, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Laksbang Press Indo Yogyakarta, Yogyakarta.
- Schoorl, Pim, 2003, *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*, Penerbit Djembatan bekerjasama dengan Perwakilan KLTV, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat)*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudiyat, Imam, 1981, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Cetakan kedua), Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2005, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Diklat Kuliah Program Pascasarjana, Univeristas Gadjah Mada, Yogyakarta.

_____, 2007, *Kebijakan Pertanahan (Antara Regulasi dan Implementasi)* Cetakan ke VII, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

_____, 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Zuhdi, Susanto, 2010, *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana*, Cetakan Pertama, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/ Artikel/ Tesis-Disertasi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, “Kecamatan Sampolawa dalam Angka 2014”, *Katalog BPS 1102001. 7401.070*, CV. Kainawa Molagina, Baubau, 2014.

Darmawan, M. Yusran, “Ingatan Yang Menikam (Orang Buton Memaknai Tragedi PKI 1965)”, *Tesis*, Fisipol-Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Firdaus, Henra, “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh di Krayan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, Dalam Era Otonomi Daerah”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2009.

Fitriani, Andi, “Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kajang dan Pengelolaannya di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2003.

Husain, M. Najib, “Kepemimpinan Parabela Terhadap Sikap Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Kaombo di Kabupaten Buton”, *Disertasi*, Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, 2014.

La Hoede, Kepala Distrik jdp. Pada Sultan Buton, *Hak Kaula Swapraja atas Tanah dalam Kerajaan Buton*, Pemilik Naskah Abdul Mulku Zahari, Berita Arsip Nasional Nomor 279/Indonesia/20.

Nota Sultan/Muh. Falihi Kepada Pembantunya Tanggal 10 Juni 1959, Pemilik Naskah: Abdul Mulku Zahari, Berita Arsip Nasional Nomor 292/Indonesia/20.

Sumardjono, Maria S.W., Ihwal Hak Komunal atas Tanah, *Artikel*, Media Massa Kompas, Senin 6 Juli 2015.

Thantowi, Jawahir dkk, “Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait dengan Status Hukum dan Hak-hak Konstitusionalnya”, *Jurnal*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengelolaan Teknologi Informasi, Jakarta, 2012.

Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo, “Status Hukum dan Upaya Perlindungan Dari Kepemilikan Hak Atas Tanah Benteng Keraton Buton Sebagai Cagar Budaya Oleh Pemerintah Kota Baubau”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2008.

Warman, Kurnia, Makalah : “Tinjauan Kritis Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara Dalam Pengaturan Perundang-Undang Nasional”. *Makalah* disampaikan pada FGD: “Hukum Adat dan Hukum Negara : *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat dalam Hukum Positif Indonesia*”, diadakan oleh Komisi Ilmu Sosial-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Yogyakarta, 24 Mei 2014.

Widhiyatna, Denni, R Hutamadi Sutrisno, Kelompok Peneliti Konservasi, 2007, *Artikel*: “Tinjauan Konservasi Sumber Daya Aspal Buton, dalam: Buletin Sumber Daya Geologi”, Vol. 2 Tanggal 3 Desember 2007.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2687.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 353/Kpts-II/1986 tentang Penetapan Radius/Jarak Larangan Penebangan Pohon dari Mata Air Tepi Jurang, Waduk/Danau, Sungai dan Anak Sungai, dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan, dan Hutan Lainnya

C. Sumber lainnya

Undang-Undang Martabat Tujuh

Hikayat Sipajonga